

PELAKSANAAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI JENJANG SD DI KOTA PEKANBARU

Eunike Daniella Pinem

Email : eunikepinem0@gmail.com

Pembimbing : Abdul Sadad, S.Sos, M.Si.

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru
Kode Pos: 28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The large number of schools in Pekanbaru, of course, also has a large number of students. To provide a decent and quality education, of course, it must be balanced with the number of adequate and competent teachers. The Pekanbaru city education office is an institution that regulates the course of education in the city of Pekanbaru. The Pekanbaru City Education Office makes a program to improve the quality of educators at the basic education level, one of which is training for educators to meet competency standards. The concept used is Prajudi Admosudirdjo, namely there are four indicators: Planning, Organizing, directing, Supervising. This study uses a qualitative research type with a phenomenological approach and the required data, both primary and secondary, are obtained by using observation, interview and documentation techniques. inhibiting factors in the implementation of training for educators to meet competency standards, namely: there are still many passive trainees during training, internet connection is less stable during virtual training then difficulty in dividing task groups during virtual training and other factors are budget. The budget that should be used for the implementation of this training program is used for vaccination activities for teachers and students in the city of Pekanbaru

Keywords: Implementation, Quality Improvement, Training Program

Pendahuluan

Pendidikan sebagai salah satu bagian dari aktivitas manusia menghendaki pencapaian tujuan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kedudukan para personil pendidikan, masing-masing memiliki peran sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Satu sama lain melengkapi, tidak ada yang menduduki posisi yang dominan dalam berkontribusi pada usaha pencapaian tujuan pendidikan. Para personal pendidikan merupakan faktor produksi dalam mencetak calon-calon profesional di masa yang akan datang serta dalam hal menyuguhkan layanan pendidikan kepada para klien pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan peran dari para tenaga kependidikan, seperti guru (pengajar), pembimbing, supervisor, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga teknis, serta instansi/lembaga pendidikan yang lain.

Wajib belajar merupakan salah satu program gencar yang digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 sekolah dasar (SD) hingga kelas 9 sekolah menengah pertama (SMP). Kemudian dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah yaitu sampai kelas 12 sekolah menengah atas (SMA). Landasan pokok system keberadaan system pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang menyatakan bahwa: tiap tiap

warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.

Sesuai dengan ketentuan PP No 47 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 4 dan 5 Peraturan Daerah pada setiap daerah memungkinkan diatur menjadi wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan PP No 47 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 4 dan 5 tersebut, maka pemerintah daerah provinsi Riau bisa mengatur wajib belajar 12 tahun di provinsi Riau, dengan menyiapkan peraturan daerah, anggaran, sarana dan prasarana serta SDM (tenaga pendidik dan tenaga non kependidikan) sebagai penunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di provinsi Riau. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Pemerintah Provinsi Riau mensosialisasikan rencana pemuatan yang mampu mendukung anak untuk terus mendapatkan pembelajaran yang semestinya di sekolah hingga tingkat SMA dengan program wajib belajar 12 tahun. Sosialisasi tersebut kemudian dibuktikan dengan dibuat Peraturan Daerah Provinsi Riau No.12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan dengan anggaran 20 persen dari APBN. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memuluskan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini. Pertama, pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada murid. Maksudnya wajib belajar 12 tahun harus didukung dengan fasilitas di sekolah misalnya terkait penyediaan ruang kelas, sarana dan prasarana sekolah

sekolah serta kualitas guru dan pendidik.

Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan meningkatkan mutu pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Pekanbaru di bidang pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan sesuai kewenangan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi di tingkat Sekolah Dasar (SD) memiliki empat pelatihan yaitu

1. Pelatihan pembentukan karakter kepala sekolah
2. Pelatihan penguasaan bahasa indonesia tulis guru SD
3. Pelatihan K13
4. Pelatihan IMTF (Indonesia Millennial Teacher Festival)

Terkait dengan kualitas guru dan pendidik, seorang guru atau pendidik dapat dikatakan profesional atau tingkat profesionalismenya dapat dilihat salah satunya dari seorang guru itu telah sertifikasi atau belum. Di Pekanbaru sendiri masih lebih banyak guru yang belum sertifikasi daripada yang telah sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masih lebih banyak guru yang belum bisa dikatakan mencapai profesional sebagai guru dibandingkan yang sudah dapat dikatakan mencapai berkualitas. Berikut ini data guru yang telah disertifikasi serta yang belum disertifikasi.

Tabel 1.1 Data guru jenjang Pendidikan Dasar yang telah sertifikasi dan yang belum sertifikasi tahun 2019

No	Sertifikasi/belum sertifikasi	Jumlah
1	Sertifikasi	2309 orang
2	Belum sertifikasi	3223 orang
Jumlah		5532 orang

Sumber: Dinas Pendidikan kota Pekanbaru, 2019 (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel diatas terdapat 2309 orang guru SD yang telah disertifikasi dan 3223 orang guru SD yang belum sertifikasi di kota Pekanbaru. Jika seorang guru sudah sertifikasi maka dapat dikatakan guru tersebut telah memiliki mutu profesionalisme yang

cukup baik sebagai seorang guru. Maka dari itu penulis melampirkan data guru yang telah disertifikasi dan yang belum disertifikasi untuk melihat seberapa banyak guru jenjang pendidikan dasar yang telah mencapai mutu profesionalisme sebagai seorang guru. Dalam seleksi

sertifikasi guru sendiri terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah memenuhi skor uji kompetensi guru (UKG) yang ditetapkan oleh konsorsium sertifikasi guru (skor minimal UKG 5,5) dari data diatas dapat dilihat perbandingan guru yang belum serifikasi lebih banyak daripada yang sudah sertifikasi hal ini dapat disebabkan oleh tidak terpenuhinya

syarat syarat untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Kemudian penulis akan melampirkan jumlah data sekolah SD di kota Pekanbaru untuk melihat perbandingan jumlah guru dan siswa yang ada di kota Pekanbaru. Berikut jumlah data sekolah SD yang ada di kota pekanbaru yang terdapat di 12 kecamatan yang berstatus sekolah negeri dan swasta.

Tabel 1.2 Data Jumlah SD Di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	KECAMATAN	SD	Jumlah siswa
1	BUKIT RAYA	24	11,304
2	LIMA PULUH	22	6,635
3	TENAYAN RAYA	35	13,649
4	MARPOYAN DAMAI	37	16,555
5	PEKANBARU KOTA	10	3,588
6	PAYUNG SEKAKI	23	9,799
7	RUMBAI PESISIR	26	8,179
8	SENAPELAN	16	5,359
9	SUKAJADI	27	6,770
10	RUMBAI	19	7,770
11	SAIL	8	2,914
12	TAMPAN	53	24,815
JUMLAH		301	117,337

Sumber: Dinas Pendidikan Kota pekanbaru,2019 (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat 301 SD di kota Pekanbaru dengan jumlah siswa 117.337 orang.. Dari data dapat dilihat bahwa banyak sekolah SD di kota pekanbaru tentu banyak pula siswa yang harus mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.Sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing , mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah maka dari itu Dinas Pendeddikan kota

Pekanbaru membuat suatu program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Dasar di kota Pekanbaru. Berikut data program kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar di kota Pekanbaru.

Berikut adalah pelatihan peningkatan standar kompetensi guru yang terlaksana oleh Dinas Pendidikan kota Pekanbaru pada tahun 2021:

1. Pelatihan Penguasaan Bahasa dan Tulis Guru SD di kota Pekanbaru
2. Pelatihan Indonesia Millennial Teacher Festival (IMTF)

Pada pelatihan penguasaan bahasa dan tulis guru SD ini dilaksanakan secara online dikarenakan pandemi yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan dengan mengumpulkan sejumlah orang dan dengan tatap muka atau langsung. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 april 2021. Menurut dari penjelasan dinas pendidikan kota pekanbaru sendiri peran guru sangat penting dalam pelaksanaan literasi di sekolah. Literasi hendaknya menjadi kebiasaan siswa secara berkelanjutan. Untuk itu guru harus saling berkoordinasi agar siswa dapat belajar dan memanfaatkan dengan media belajar dengan baik. Guru adalah punggawa atau instruktur literasi di sekolah. Setiap instruktur memiliki hal unik dan strategi literasi yang berbeda. Untuk itu, instruktur literasi harus rajin berlatih dan literasi adalah saling berbagi pengalaman. Dalam pelatihan penguasaan bahasa dan tulis guru SD ini diikuti oleh 625 orang guru SD negeri melalui zoom. Pada pelatihan ini peserta dibekali wawasan dan pengetahuan oleh narasumber. Dalam pelatihan ini juga peserta dibagi menjadi beberapa kelompok tugas untuk dapat berdiskusi dan sharing pengalaman selama mengajar tujuannya agar dapat menambah wawasan setiap peserta dari hasil diskusi tugas dan sharing pengalaman tersebut.

Pelatihan lain yang terlaksana yaitu pelatihan Indonesia Millennial Teacher Festival (IMTF). Pelatihan ini dilaksanakan secara online melalui zoom pada tanggal 15 sampai 17 juli 2021 dipusatkan di lantai enam pusat kantor Pemko Pekanbaru. Pesertanya berjumlah 988 orang guru SD negeri dan 82

orang guru SD swasta jadi total peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah 1070 orang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar dalam situasi pandemi ini melalui zoom. Dibekali bagaimana cara mengajar dengan zoom agar tetap efektif dan menarik sehingga siswa tidak merasa bosan. Dalam pelatihan ini didatangkan narasumber dari psikolog anak, praktisi pendidikan, walikota pekanbaru.

Beberapa alasan peneliti tertarik melakukan pengkajian masalah pada pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi di Kota Pekanbaru ditemukan fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Menurut data guru jenjang Pendidikan Dasar tahun 2019 masih banyak guru yang belum disertifikasi di Kota Pekanbaru, dari 5532 orang guru SD yang ada di Pekanbaru hanya 2309 orang guru SD yang telah disertifikasi.
2. Perbandingan jumlah siswa dengan jumlah guru yang sudah tersertifikasi tidak seimbang.
3. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) di Riau baru mencapai rata-rata 5,4, sedangkan Mendikbud menetapkan harus mencapai 8. (*sumber: Cakaplah.com, Kamis, 13 Januari 2022*)

Uji Kompetensi Guru (UKG) adalah sebuah ujian mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi dan pedagogik, pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi dalam kelas. Untuk hasil UKG itu sendiri dapat dikatakan lulus jika telah mencapai nilai 8. Ini adalah nilai

yang telah ditetapkan oleh Mendikbud.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih lebih banyak guru yang tingkat profesionalitasnya belum baik dibandingkan yang telah professional dan juga adanya ketidakseimbangan antara jumlah guru yang telah sertifikasi dengan jumlah siswa SD yang akan menerima pendidikan di kota pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2. berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik meneliti mengenai “**Pelaksanaan Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi Jenjang SD di Kota Pekanbaru**”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SD di kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi pada program kegiatan peningkatan mutu pendidik jenjang SD di kota Pekanbaru?

Studi Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebagaimana yang dilakukan oleh Marlien T. Lopian (2015) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) – Perkotaan di Kota Manado dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini sama halnya menunjukkan pelaksanaan. Program adapun hasil penelitian dapat dijabarkan adalah

hambatan atau kelemahan aspek pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM)-perkotaan Manado.

Yuli Kartika Efendi (2017) Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Pelaksanaan program pelatihan di UPTPK Pasuruan adalah pihak lembaga sendiri (in house) lembaga luar sekolah / lembaga lain yang melaksanakan program pelatihan. Pada umumnya jenis program pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan keterampilan. Penelitian ini sama halnya menunjukkan pelaksanaan program untuk peningkatan SDM masyarakat di jawa timur.

Agus Siswanto (2017) Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bantul dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sama halnya tujuan penelitian ini adalah menunjukkan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kabupaten bantul. hasil penelitian ini adalah melihat hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kabupaten bantul.

Kerangka Teori

1. Konsep Manajemen

Koontz dan O'donnel dalam (Amirullah dkk, 2004), mendefinisikan adalah usaha mencapai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Sedangkan menurut **Hasibuan** dalam (**Marnis,2008**), manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut **admosudirdjo (2004)** menyatakan bahwa manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan. Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut **Admosudirdjo:**

- a. Perencanaan (*planning*)
Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
- b. Pengorganisasian (*organizing*)
Organizing (organisasi) adalah dua atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran.
- c. Pelaksanaan (*actuating*)
Actuating adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, sasaran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
- d. Pengawasan (*controlling*)
Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga

apa yang dilakukan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula.

2. Konsep Pelaksanaan

Menurut **G.R Terry** dalam (**Hasibuan 2018**) Actuating adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Dalam ini dari sudut pandang **George C.Edward** di dalam (**Widodo,2011**) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau tidaknya suatu implementasi kebijakan yaitu:

- a. Komunikasi
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti merupakan suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. Sumber daya
Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
- c. Disposisi
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran. Karakteristik penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan sedangkan komitmen tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi yang melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedure (SOP). Sebagai pedoman bagi implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel

3. Konsep Program

Menurut **Karding** dalam (**Rinaldi 2018**), program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan

program dalam arti umum. Secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila ini diartikan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Afrizal dalam (**Risvayanti, 2019**) dalam menggambarkan dan menganalisis program terdapat bagian-bagian pokok yang harus ada, yaitu:

- a. Inputs: adalah sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan program, contohnya: dana, SDM, sarana, fasilitas pendukung, pengetahuan, dll.
- b. Komponen: kelompok aktif dalam program.
- c. Implementasi kerja atau pelaksanaan: contohnya, modal untuk menilai kebutuhan pelatihan bagi peserta, skill departemen untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil.
- d. Bentuk-bentuk hubungan antar lini: maksudnya adalah inventarisir faktor-faktor apa saja yang bisa menjembatani antar output dari suatu program dengan outcomes.
- e. Outcomes: sebanyak mungkin output program diterima masyarakat pada semua sektor.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut (**Creswell, 2016**), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan

memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Alasan peneliti memilih metode kualitatif, dimana model analisis yang digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami, dan diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai permasalahan atau fenomena-fenomena yang ada.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis kualitatif bersifat deskriptif dengan menggambarkan data yang ada diberbagai sumber serta menghubungkan fenomena-fenomena sosial dan menelusuri segala fakta yang dengan pelaksanaan pembangunan pendidikan di provinsi Riau yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekanbaru.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Bapak Yurdani.
2. Kepala Seksi Tenaga Pendidik SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Bapak Sardius.
3. Pegawai Sistem Tenaga Pendidik SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ibu Erna.
4. Tenaga Pendidik yang mengikuti pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru:
 - 1) Guru SDN 92 Pekanbaru Bapak David Simanjuntak, S.Pd.
 - 2) Guru SDN 37 Pekanbaru Ibu Islamiyah, S.Pd.

- 3) Guru SDN 136 Pekanbaru Bapak Farhan S, Pd

Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi jenjang Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru. Data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini Undang-Undang 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintahan Daerah, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi Observasi (Pengamatan), *Interview* (Wawancara), Dokumentasi.

Analisis data juga merupakan aktivitas penalaran dan pengamatan lebih luas mengenai gejala-gejala dan informasi dari hasil penelitian, data-data yang didapat dikumpulkan dan diklarifikasi menurut jenisnya lalu penelitian menganalisa data dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yang berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang dengan penelitian pelaksanaan pelatihan tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi jenjang Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru.

Gambaran Umum

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan.

Pembahasan

Bagaimana pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi jenjang Sekolah Dasar di kota pekanbaru

a. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Kota Pekanbaru sebagai dasar dalam melaksanakan sebuah pelatihan bagi

guru SD untuk meningkatkan kompetensi di kota Pekanbaru. Kemampuan dalam melakukan sebuah perencanaan pada awal tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian pengelola program itu sendiri mengenai tujuan dan sasaran yang akan diperoleh. Sebab perencanaan pada awal memberikan kontribusi sangat penting yang positif bagi pengelola dalam mewujudkan visi dan misi tersebut.

Dinas Pendidikan kota Pekanbaru menyusun program kegiatan dengan memperhatikan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan di lapangan sehingga program kegiatan yang disusun memiliki manfaat bagi penerima pelatihan dengan tujuan tetap sama pada tujuan awal yaitu dapat meningkatkan kualitas pendidikan di kota Pekanbaru.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam tanggung jawab hal pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi jenjang sekolah dasar di kota Pekanbaru sudah jelas dengan adanya tugas pokok dan fungsi (tufoksi) dari Dinas Pendidikan kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari adanya struktur organisasi dinas yang ada di kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Setiap kepala bidang memiliki wewenang untuk memimpin anggota kelompok bidangnya masing-masing dengan tujuan agar berjalan setiap program yang telah diserahkan pada setiap bidang. Pada program pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi ini kepala bidang memberi wewenang kepada kepala Sistem tenaga pendidikan SD untuk

melaksanakan program kegiatan pelatihan tersebut.

c. **Directing (Pengarahan)**

Directing bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan pelatihan lebih banyak dilaksanakan melalui zoom dikarenakan situasi pandemi saat ini yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan peserta dalam jumlah banyak dalam suatu gedung atau ruangan. Namun pelatihan tetap diupayakan berjalan dengan semestinya serta diupayakan semenarik mungkin dengan mendatangkan narasumber yang cukup profesional agar peserta pelatihan tidak jenuh atau bosan saat mengikuti pelatihan sehingga diharapkan materi dapat tersampaikan dengan baik dengan harapan setiap peserta dapat menerapkan apa yang mereka dapat di pelatihan disekolah. Kemudian setelah mengikuti pelatihan para peserta akan diberikan sertifikat tanda bahwa sudah pernah mengikuti pelatihan.

d. **Pengawasan**

Pentingnya pengawasan dalam manajemen dibutuhkan dalam sebuah usaha karena kita harus memastikan bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Manajemen pengawasan untuk Aparatur Sipil Negeri sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap

pengawasan pegawai adalah jabatan pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana yang meliputi pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.

Dalam tahap-tahap yang sudah dijelaskan diatas dapat kita lihat bahwa dalam proses pengawasan tidak hanya dilakukan sekali atau sehari saja namun pengawasan dilakukan dalam beberapa tahap untuk menemukan titik terang dari masalah yang dihadapi oleh guru dalam tindakan pembelajaran di kelas. Tahapannya meliputi pertemuan awal, tahap observasi di kelas, dan tahap pertemuan balikan. Keberhasilan sebuah program pelatihan peningkatan mutu guru ini dapat diukur dari sejauh mana kemampuan profesional yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran. Oleh karena itu guru harus memiliki kemampuan: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melakukan evaluasi/penilaian dengan baik untuk mengukur keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Ketiga kemampuan tersebut dasar yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh guru.

Faktor penghambat pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi pada program kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di kota pekanbaru

Dari penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi pada program kegiatan peningkatan mutu

pendidik dan tenaga kependidikan di kota pekanbaru terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan program kegiatan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. **Kondisi Pelatihan**

Masih banyak peserta pelatihan yang pasif pada saat pelatihan sehingga menyulitkan trainer dalam berinteraksi maupun sulit untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan dapat diterima atau dimengerti oleh peserta pelatihan. Yang dimana harapannya jika belum atau tidak dimengerti oleh peserta dapat dijelaskan lebih rinci oleh narasumber atau trainer namun masih banyak peserta yang lebih memilih pasif saat proses pelatihan dilaksanakan

2. **Masalah Koneksi**

Tidak jarang peserta menghadapi sedikit gangguan dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Baik itu terkait pekerjaan rutinitasnya di kantor atau di rumah, mengikuti pelatihan sambil berjalan/berkendara dan sebagainya. Sehingga pelaksanaan pelatihan tidak berjalan maksimal dan tidak fokus seperti yang diharapkan dikarenakan konektivitas antara narasumber dan peserta sering kali mendapat gangguan dari lingkungan sekitar peserta.

3. **Pembagian Kelompok**

Dalam pembagia kelompok tugas pada saat pelatihan virtual mengalami kendala jaringan internet yang kurang stabil sehingga dapat berdampak negative pada konektivitas anatar peserta kelompok maupun narasumber. Hal ini menyebabkan pelatihan dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik sehingga dampaknya adalah materi pelatihan yang tidak tersampaikan pada peserta kurang maksimal.

4. **Anggaran**

Ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana karena terhambat dalam anggaran. Yang sebenarnya anggaran tersebut sudah dicairkan dari pusat namun dialih fungsikan untuk kepentingan lain. Anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan vaksinasi seluruh guru dan siswa/siswi di kota pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Sehingga program kegiatan yang harunsya dilaksanakan dengan menggunakan anggaran tersebut tidak terlaksana seluruhnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait “pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi jenjang SD di kota pekanbaru “ maka penulis menguraikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi jenjang SD di kota pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi jenjang SD di kota Pekanbaru sudah diupayakan dan diusahakan dilaksanakan dengan baik namun belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya beberapa indikator yaitu perencanaan yang dilakukan dengan memperhatikan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan para guru di sekolah, kemudian pengorganisasian atau pembagia kelompok kerja dalam pelaksanaan pelatihan ini dibagikan menurut bidang yang dianggap ,pada pengarahan juga tetap dilaksanakan berdasarkan

arahan dari kepala dinas kemudian kepala bidang serta pelaksanaan dilakukan secara virtual dikarenakan situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan peserta dalam suatu ruangan.

2. Faktor penghambat pelaksanaan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi jenjang SD di kota Pekanbaru

Faktor penghambat pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi jenjang SD di kota Pekanbaru adalah peserta pelatihan yang lebih banyak pasif sehingga narasumber sulit untuk berinteraksi, lalu dalam pelatihan virtual yang telah dilakukan juga ada beberapa kendala seperti sulitnya dalam pembagian tugas kelompok pada saat pelatihan serta koneksi internet yang sering tidak stabil sehingga berdampak buruk pada saat proses pelatihan virtual berlangsung. Selain itu anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kegiatan ini dialokasikan untuk kepentingan vaksinasi guru dan siswa di kota pekanbaru sehingga ada beberapa program kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Dikdas di kota pekanbaru tidak terlaksana.

Daftar Pustaka

Buku:

- Admosudirdjo, Prajudi. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Global*. Bandung. PT Intan Perkasa.
- Amirullah, dkk. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Kebumen: Mediaterra.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Malayu S.P, Hasibuan. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu S.P, 2018. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta PT. Bumi Aksara.
- Manullang. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Manullang, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. UGM: Yogyakarta.
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : unri press
- M. A, Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nawawi, Ismail. 2007. *Public Policy*. Surabaya: Pmn.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Sukarna. (2011). *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Ritonga, Hasnun Januahari. 2015. *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*. Medan : Perdana Publishing.
- Urman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu media Publishing

Skripsi :

Aristha, Giovanni Siregar. 2017. *Pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kota Pekanbaru*

Irsyad, Mukhamil Merlion. 2017. *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru*

Rinaldi, Dani Sitepu. 2018. *Pelaksanaan Program Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Sipiso-piso Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Karo.*

Risvayanti, Veny. 2019. *Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Pesisir Kecamatan LimaPuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017.*